

ANALISIS KEBIJAKAN AMERIKA SERIKAT DALAM PENGGUNAAN UNMANNED COMBAT AERIAL VEHICLE (UCAV) DI NIGER TAHUN 2018

Dewa Ketut Dharmayasa⁽¹⁾, A.A. Bagus Surya Widya Nugraha⁽²⁾, Ni Wayan Rainy Priadarsini⁽³⁾

^(1, 2, 3)Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Email: dharmayasa.dwtut@gmail.com⁽¹⁾, aabasuwinu@gmail.com⁽²⁾, rainypriadarsini@yahoo.com⁽³⁾

ABSTRACT

The terrorist attack that occurred in the United States on September 9, 2001 often remembered as the 9/11 tragedy, is the worst terrorist attack the United States has experienced in its history. In combating the terrorist groups for the responsibility for these attacks, the United States responded by launching a campaign against terrorism known as Global War on Terrorism by issuing military strategies as a form of implementation. To deal with increased terrorist activity in the Niger region, the United States uses a varied military strategy, one of those strategy is UCAV usage. This study analyzes and describes the reasons for changes in United States military policy using Unmanned Combat Aerial Vehicle (UCAV) in Niger in 2018. This study uses a rational choice framework and national security strategy to explain the reasons for changing military policy by using UCAV drones in Niger. The methodology used in this research is qualitative-explanative.

Keywords : *United States, Niger, National Military Strategy, Unmanned Combat Aerial Vehicle, UCAV*

1. PENDAHULUAN

Serangan terorisme yang terjadi di Amerika Serikat pada 9 September 2001 atau yang sering dikenang sebagai tragedi 9/11, merupakan serangan teroris terburuk yang pernah dialami Amerika Serikat dalam sejarahnya. Serangan ini menimbulkan jumlah korban yang tidak sedikit, tercatat sebanyak 2.996 orang meninggal dalam serangan ini (Plumer, 2013). Tidak lama setelah serangan ini terjadi, Osama Bin Laden pimpinan dari Al-Qaeda, mengaku bertanggung jawab atas serangan yang terjadi di Amerika Serikat tersebut. Tragedi ini tentunya merupakan tragedi teror terbesar di Amerika Serikat dan menyebabkan trauma berkepanjangan serta kerugian yang sangat besar bagi negara tersebut.

Amerika Serikat tentunya memberikan respon terhadap serangan yang terjadi dengan memerangi jaringan teroris dan mencegah agar kejadian serupa tidak terjadi kembali. Respon tersebut direalisasikan dalam sebuah kebijakan Amerika Serikat yakni kebijakan Global War on Terror (GWOT), dengan terorisme sebagai ancaman fundamental bagi stabilitas keamanan nasional dan internasional (Bush White House, 2003). Operasi militer merupakan langkah lanjutan dalam implementasi kebijakan tersebut, strategi keamanan dalam memberantas terorisme pasca tragedi 9/11 semakin mengalami peningkatan terlihat dari pengembangan dan pemanfaatan teknologi yang semakin moderen salah satunya adalah penggunaan teknologi pesawat tanpa awak yang dikendalikan dari jarak jauh.

UCAV sudah digunakan dalam beberapa misi counterterrorism oleh Amerika Serikat sejak era pemerintahan Bush sejalan dengan implementasi kebijakan GWOT. Namun dalam penggunaannya, masyarakat sipil juga terkena dampak dari penggunaan drone bersenjata ini. Selain menewaskan warga sipil, UCAV juga dapat menyebabkan rasa tidak aman bagi masyarakat sekitar yang masuk dalam radius ledakan senjata yang digunakan oleh UCAV tersebut (Callam, 2010). Kritik pun bermunculan dari beberapa organisasi hak asasi manusia dan komunitas internasional lainnya yang merasa prihatin atas dampak kematian warga sipil yang ditimbulkan terkait penggunaan UCAV.

Pada implementasi kebijakan GWOT, Amerika Serikat membentuk aliansi dengan negara lain dalam memerangi kelompok-kelompok teroris yang menjadi ancaman bagi keamanan nasional negara Amerika Serikat. Salah satu bentuk dari aliansi tersebut adalah pembangunan kapabilitas militer negara-negara di kawasan Afrika khususnya wilayah Sahel. Aliansi ini dibentuk dalam rangka mempersempit ruang gerak dari jaringan teroris yang memiliki afiliasi dengan jaringan Al-Qaeda antara lain, Al-Qaeda in the Islamic Maghreb (AQIM) dan Jama'a Nusrat ul-Islam wa al-Muslimin (JNIM). Selain jaringan yang berafiliasi dengan Al-Qaeda, terdapat jaringan lain seperti Islamic State of Iraq and Syrian – Greater Sahara (ISIS-GS), Boko Haram, dan Movement for Oneness and Jihad in West Africa (MUJAO) (Wijaya, 2019). Dalam

memerangi kelompok-kelompok teroris tersebut, Amerika Serikat melegitimasi penggunaan senjata apapun dalam menunjang misi kontraterorisme ini, termasuk penggunaan UCAV atau drones yang dipersenjatai.

Niger merupakan salah satu negara di wilayah Sahel yang menjadi mitra aliansi dari Amerika Serikat. Aliansi Amerika Serikat dengan Niger terbentuk pada tahun 2002 bersamaan dengan pembentukan Pan Sahel Initiative (PSI) oleh Amerika Serikat. Tujuan aliansi Amerika Serikat dan Niger sejalan dengan tujuan PSI dalam melawan teroris, melakukan kontrol terhadap perdagangan senjata, dan peningkatan keamanan kawasan (Ellis, 2004:462). Dalam kemitraan ini, Amerika Serikat berfokus pada operasi intelijen dan pembangunan kapabilitas militer kawasan. Sejak tahun 2013, Amerika Serikat mulai menempatkan sebanyak 100 pasukan militernya di Niger.

Hingga akhir tahun 2017, Amerika Serikat sudah menempatkan setidaknya 800 pasukan angkatan darat dan juga menggunakan UAV sebagai bentuk pendampingan terhadap pasukan militer Niger dalam operasi-operasi militer di kawasan (Aljazeera, 2018). Penempatan pasukan tersebut merupakan jumlah pasukan terbesar kedua yang ditempatkan oleh Amerika Serikat di Afrika setelah penempatan di Djibouti sebanyak 4000 pasukan (Wijaya, 2019). Namun pada tahun 2018 Amerika Serikat mulai melakukan perubahan strategi, dan menempatkan UCAV sebagai pilihan utama diatas penggunaan pasukan konvensional.

Penerapan kebijakan penggunaan UCAV oleh Amerika Serikat ini menjadi kontroversi karena mendapat kecaman dari komunitas internasional. Pemerintahan saat ini dianggap kurang memperhatikan dampak dari serangan yang dilakukan oleh UCAV, selain itu pengambilan keputusan ini juga tidak sesuai dengan motivasi awal penempatan dan penggunaan teknologi drones di Niger oleh pemerintahan sebelumnya (Stohl, 2018:15). Niger bukanlah negara pelaku terror, dan apabila dilihat secara geografis Niger merupakan negara kecil dan landlocked (Wijaya, 2019).

Kebijakan tersebut diyakini akan menimbulkan dampak yang tidak perlu (collateral damage) dapat berupa korban jiwa dari masyarakat sipil, dan juga dikhawatirkan akan memperburuk kondisi keamanan di kawasan Sahel karena diyakini akan menjadi magnet yang dapat menarik perhatian kelompok teroris khususnya kelompok yang menentang kepentingan Amerika Serikat di kawasan Sahel (Cerre, 2019). Berangkat dari latar belakang tersebut, penelitian ini tertarik untuk menganalisis lebih jauh mengenai alasan Amerika Serikat tetap menerapkan kebijakan penggunaan UCAV di Niger pada tahun 2018.

Rumusan Masalah

Penelitian ini kemudian merumuskan masalah, **Mengapa Amerika Serikat melakukan perubahan terhadap kebijakan strategi militernya dengan menggunakan *Unmanned Combat Aerial Vehicle* (UCAV) di Niger pada tahun 2018?**

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan alasan penerapan kebijakan penggunaan Unmanned Combat Aerial Vehicle (UCAV) oleh Amerika Serikat di Niger pada tahun 2018.

2. KAJIAN PUSTAKA

Pilihan Rasional

Pilihan rasional merupakan sebuah konsepsi pengambilan keputusan dengan mengesampingkan nilai moralitas baik dan buruk yang dapat mempengaruhi aktor dalam membuat suatu kebijakan. Kebijakan yang diambil dapat dipandang sebagai keputusan kolektif dari pilihan individu atau unitary actor dalam pilihan rasional. Menurut Waltz mengenai pilihan rasional yang dikutip dari Dewi (2018) yaitu, negara sebagai unitary actor dalam interaksinya tentu menggunakan rasionalitas. Negara perlu untuk mempertimbangkan keuntungan, menganalisis tujuan dan mengevaluasi pilihan-pilihan yang muncul, sehingga kebijakan yang dikeluarkan dapat dikatakan sebagai *rational choice* atau pilihan rasional. Waltz menyatakan bahwa teori pilihan rasional merupakan alat untuk membuat kesimpulan logis tentang aktor membuat keputusan. Dari penjelasan mengenai teori pilihan rasional dapat disimpulkan bahwa teori ini digunakan pada penelitian ini untuk menganalisa apa maksud dan tujuan dari negara, dan untuk menganalisa *cost* dan *benefit* dari pilihan yang dilakukan negara untuk mencapai kepentingannya.

Kebijakan luar negeri merupakan bentuk rasionalitas yang menjadi tujuan dalam menjalankan kebijakan yang sesuai dengan kepentingan negara sehingga sejalan dengan kebijakan domestik suatu negara. Melalui kebijakan luar negeri pilihan rasional yang dirumuskan diharapkan dapat menjaga keamanan nasional dan mewujudkan kepentingan nasional suatu negara. Pada setiap proses pembuatan kebijakan luar negeri (decision making process) memang dipengaruhi oleh banyak faktor.

Proses pembuatan kebijakan luar negeri juga melibatkan banyak aktor domestik yang berasal dari berbagai institusi, tidak jarang dari berbagai aktor yang terlibat dalam proses pembuatan kebijakan luar negeri itu memiliki kepentingan yang berbeda-beda sehingga terjadi proses tarik-menarik kepentingan. Namun, kebijakan luar negeri yang dihasilkan tetap merupakan satu kebijakan yang diyakini bisa memenuhi kepentingan nasional secara maksimal berdasarkan pertimbangan konsekuensi yang ditimbulkan dari kebijakan tersebut (Khairani, 2014). Oleh karena itu pilihan rasional menjadi penting untuk digunakan dalam menganalisis maksud dan tujuan dari suatu kebijakan. Melalui pilihan rasional *cost* dan *benefit* dari pilihan alternatif yang muncul akan dianalisis untuk memperoleh hasil yang optimal.

Penelitian ini akan menganalisis mengenai kebijakan yang diimplementasikan oleh Amerika Serikat sebagai unitary actor. Pembuatan kebijakan

luar negeri Amerika Serikat tentunya mengacu pada kondisi domestik negaranya. Selanjutnya penelitian ini akan menjelaskan tujuan penggunaan UCAV oleh Amerika Serikat sebagai langkah untuk mencapai kepentingan nasionalnya yang tertuang salah satunya dalam bentuk kemandirian nasional. Tentunya dalam implementasi kebijakan penggunaan UCAV di Niger, pilihan alternatif yang muncul akan dianalisis dan dievaluasi melalui pertimbangan *cost* and *benefits* sehingga dapat memberikan keuntungan yang optimal kepada Amerika Serikat dalam mewujudkan kepentingan nasionalnya. Oleh karena itu, kebijakan yang diambil akan menjadi pilihan yang rasional.

Strategi Keamanan Nasional

Keamanan menjadi salah satu pertimbangan penting sebagai pilar dalam menentukan langkah negara dalam pembentukan kebijakan yang ditujukan untuk menghadapi ancaman yang berasal baik dari dalam maupun dari luar negara bersangkutan. Keamanan nasional merupakan akumulasi dari keamanan individu-individu yang terintegrasi dalam sebuah wilayah yang disebut dengan negara (Buzan, 1983:18). Keamanan nasional juga berarti mengamankan unsur-unsur pembentukan negara meliputi wilayah, penduduk, kedaulatan, konstitusi, dan pemerintahan yang menjalankan fungsinya dalam sebuah negara. Bagi suatu negara, ancaman dapat berasal baik dari dalam negara maupun dari lingkungan internasional (Dewi, 2018:21).

Dalam perumusan strategi, menurut Barry Posen (2014) strategi keamanan nasional Amerika Serikat yang selanjutnya dikenal dengan nama US Grand Strategy terbagi kedalam dua bentuk strategi yakni, *Liberal Hegemony* dan *Restraint Strategy*. Posen (2014) menjelaskan bahwa telah terjadi transisi dari *Liberal Hegemony* menuju *Restraint Strategy* yang lebih menguntungkan di era sekarang. Liberal Hegemony dapat didefinisikan sebagai grand strategy yang bertujuan untuk mempertahankan hegemoni Amerika Serikat dan momen unipolar dalam pandangan ideologi liberalisme Amerika Serikat dan keamanan nasional. Strategi ini mengutamakan *power maximalizing* dalam upaya Amerika Serikat mencapai hegemon.

Posen (2014) berpendapat bahwa *Liberal Hegemony* adalah strategi yang telah diimplementasikan oleh Amerika Serikat sejak akhir Perang Dingin dan menyebutkan bahwa strategi tersebut sudah tidak relevan untuk era sekarang, kontraproduktif, mahal, dan boros. Hal ini didasari pada pandangan Posen (2014) bahwa Amerika Serikat telah mengeluarkan biaya yang besar dalam bentuk uang dan korban dari aktivitas militer bahkan setelah Perang Dingin berakhir, pasukan militer Amerika Serikat merupakan instrumen yang mahal. Pada 2010, Amerika Serikat telah menghabiskan \$784 miliar untuk perang Iraq, \$321 miliar untuk Afghanistan dan kegiatan lainnya terkait dengan kampanye "*Global War on Terror*". Melebihi uang, perang yang dilakukan oleh Amerika Serikat memiliki biaya yang lebih tragis bagi

tentara Amerika yang terbunuh, serta tanggungan keluarga mereka setelahnya. Selain itu banyak negara dengan power kecil dan menengah yang memanfaatkan dan memperoleh keuntungan dari upaya Amerika Serikat untuk memberikan pengaruhnya kemanapun negara tersebut berada. Selain memiliki kemampuan besar, para pemimpin Amerika Serikat telah terobsesi dengan kredibilitas komitmen mereka sehingga merasa perlu untuk selalu memberikan bantuan dalam permasalahan keamanan global. Hal ini dapat terlihat pada intervensi militer, penempatan pasukan darat, dan upaya lainnya dalam memperoleh power melebihi negara lainnya.

Restraint Strategy sebagai transisi dari strategi *Liberal Hegemony* dapat diartikan sebagai sebuah strategi yang mengutamakan *security maximazing*. Strategi ini berpandangan bahwa setelah Perang Dingin selesai tidak menempatkan Amerika Serikat sebagai aktor unipolar melainkan terdapat negara lain yang juga melakukan balancing terhadap Amerika Serikat seperti Tiongkok dan Rusia. Implementasi dari strategi ini menekankan pada peran pasukan darat yang semakin minim dalam kuantitas penempatan pasukan, peningkatan penggunaan teknologi sebagai sumber daya potensial dalam operasi militer, memungkinkan Amerika Serikat melindungi prioritas kepentingan nasionalnya, mengambil keuntungan dari posisi geostrategis dan memanfaatkan sekutu untuk berkontribusi pada kepentingan keamanan nasional

Amerika Serikat. Implementasi tersebut kemudian dikemas kedalam bentuk strategi militer *command of the commons*. *Command* menekankan pada komando terhadap elemen global oleh militer Amerika Serikat meliputi, komando laut, komando antariksa, dan komando udara. *Commons* dimaksudkan sebagai elemen laut, antariksa, dan udara yang merupakan area yang menyediakan akses ke sebagian hingga seluruh dunia.

Strategi ini menawarkan mobilisasi sumber daya militer yang semakin efisien. Dengan pemanfaatan sumber daya militer yang tepat melalui *command of the commons*, militer dapat dapat mencapai target jauh di pedalaman, dan apabila menggunakan persenjataan modern dengan presisi serangan yang cukup tinggi, seringkali dapat mengenai dan menghancurkan target, serta memberikan kebebasan terhadap pasukan darat untuk tidak terlibat langsung dalam operasi militer tersebut. *Command of the commons* memungkinkan Amerika Serikat untuk memaksimalkan keamanan diri sendiri baik saat sedang melakukan operasi militer di luar negeri dan mampu mempengaruhi kemampuan musuh melalui serangan langsung. Hal ini memberikan Amerika Serikat kebebasan bertindak dan memberikan bantuan dan dorongan kepada sekutunya untuk lebih bertanggung jawab atas keamanan mereka sendiri. Penelitian ini kemudian akan menganalisis keputusan Amerika Serikat melakukan implementasi kebijakan penggunaan drones dalam mengejar kepentingan nasional, salah

satunya keamanan nasional Amerika Serikat.

3. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode eksplanatif-kualitatif. Metode kualitatif dapat digunakan untuk memperoleh data yang mendalam serta dapat diartikan sebagai metode yang tidak menggunakan unsur hitung-menghitung meskipun terdapat data angka didalamnya. Metode eksplanatif sebagaimana dikutip dari Mas'ood (1990) dapat membantu menjelaskan dan memahami terkait dengan fenomena internasional. Metode ini dapat membantu memahami mengapa individu, kelompok individu, negara, kelompok negara dalam suatu wilayah atau sistem internasional berada dalam keadaan tertentu atau bertingkah laku. Penelitian ini tergolong sebagai penelitian eksplanatif-kualitatif karena menjelaskan rasionalitas dan strategi keamanan nasional sebagai alasan implementasi kebijakan penggunaan *Unmanned Combat Aerial Vehicle* (UCAV) di Niger.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Intensitas Ancaman Terorisme di Afrika Barat

Terorisme sebagai sebuah bentuk ancaman terhadap keamanan negara bukanlah suatu bentuk ancaman baru. Terorisme terus mempengaruhi hak asasi manusia yang mendasar baik secara langsung maupun tidak langsung, termasuk berkontribusi pada sejumlah besar orang yang dipindahkan secara paksa dari tempat

tinggal atau negara mereka. Sebagai akibatnya, terorisme tetap menjadi prioritas tinggi bagi komunitas internasional, termasuk para aktor keamanan, terkait dengan strategi kontraterorisme yang komprehensif. Ancaman terorisme berkembang menjadi prioritas ancaman keamanan global dilatarbelakangi oleh tragedi 9/11 yang terjadi di Amerika Serikat dan dicetuskannya kampanye *Global War on Terror* (GWOT).

Selain Afghanistan dan Iraq yang menjadi pusat operasional GWOT Amerika Serikat, terdapat pula kelompok-kelompok jaringan terorisme global yang mengancam bagian lain dunia, salah satunya yang paling berbahaya berada di Afrika salah satunya di wilayah Baret yakni wilayah Sahel. Kombinasi negara-negara yang relatif lemah, keragaman etnis dan agama, tingkat diskriminasi, kemiskinan, dan masih terdapat wilayah yang tidak dikontrol secara penuh mengakibatkan Afrika menjadi wilayah yang mudah dipengaruhi dan menjadi basis pertumbuhan gerakan radikal dan terhubung secara internasional dengan jaringan terorisme (Lyman, n.d.).

Ancaman Terorisme di Niger

Niger menjadi salah satu mitra penting bagi Amerika Serikat dalam memerangi jaringan teroris khususnya Al-Qaeda dan afiliasinya yang beroperasi di wilayah Sahel. Selain kelompok Al-Qaeda dan afiliasinya, terdapat jaringan lain seperti *Islamic State of Iraq and Syrian – Greater Sahara* (ISIS-GS), Boko Haram, dan *Movement for Oneness and Jihad in West Africa* (MUJAO) yang aktif di wilayah

Niger. Secara geografis Niger memiliki wilayah yang sangat strategis sebagai rute operasi kelompok teroris dalam mencari pendanaan melalui penyelundupan narkoba dan senjata oleh jaringan terorisme yang beroperasi di Afrika.

Melalui laporan dari *The Financial Action Task Force* (FATF) yang dikeluarkan pada tahun 2016, menyatakan bahwa otoritas Niger bekerja sama dengan mitranya, berhasil menangkap anggota jaringan teroris yang beroperasi dan ingin melancarkan serangan di Niger. Pada Februari 2015, melalui operasi gabungan otoritas Niger berhasil menemukan senjata, amunisi dan sejumlah besar uang yang ditemukan selama operasi di wilayah Diffa, Niger. Selain sebagai jalur penyelundupan senjata dan penyelundupan narkoba, Niger memiliki potensi menjadi basis perekrutan oleh kelompok teroris yang beroperasi di wilayah Sahel (Wijaya, 2019). Kondisi ekonomi masyarakat Niger yang sangat rendah juga menjadi faktor pendukung lainnya dalam menarik jaringan teroris untuk masuk dan melakukan perekrutan. Dalam laporan *Human Development Index* (HDI) yang dirilis oleh PBB, Niger pada tahun 2017 menempati posisi terakhir dari 189 Negara. Hal ini juga didasari oleh 44% dari 22,31 juta jiwa penduduk Niger masih hidup dibawah garis kemiskinan dengan pendapatan per-kapita dibawah 420 USD per tahun (UNDP, 2019). Melihat potensi ancaman dan kerentanan yang terjadi di Niger menjadikan negara tersebut sebagai salah satu bagian dari kemitraan strategis Amerika Serikat di wilayah Sahel dalam menumpas jaringan terorisme global.

Strategi Keamanan Nasional Amerika Serikat di Wilayah Sahel

Peristiwa 9/11 merupakan tragedi terorisme terbesar dalam sejarah Amerika Serikat dan banyak mempengaruhi pengambilan kebijakan pemerintah negara tersebut. Sebagai bentuk respon dari tragedi tersebut dan dengan dicetuskannya kebijakan GWOT telah menaikkan status terorisme sebagai ancaman keamanan nasional, Amerika Serikat sudah melakukan berbagai operasi militer sebagai strategi pemberantasan jaringan teroris global, khususnya Al-Qaeda yang telah mengklaim bertanggung jawab atas tragedi 9/11. *Operation Enduring Freedom-Trans Sahara* (OEF-TS) merupakan operasi kontraterorisme lanjutan dari OEF-A dan OIF sebagai implementasi dari kebijakan GWOT yang dikeluarkan oleh Pemerintah Amerika Serikat pasca tragedi 9/11. Operasi ini dimulai pada awal tahun 2007 dan memiliki tujuan untuk melawan Al-Qaeda serta melawan jaringan teroris global yang beroperasi di wilayah Sahel, membentuk hubungan perdamaian, keamanan, dan kerja sama di antara semua negara Trans Sahara, OEF-TS juga bertujuan memperkuat operasi kontraterorisme, keamanan perbatasan, mempromosikan pemerintahan yang demokratis, memperkuat ikatan militer bilateral, menyediakan pelatihan, peralatan, bantuan, dan sarana untuk pasukan bersenjata negara mitra.

Operasi militer Amerika Serikat di wilayah Sahel, mengalami peningkatan strategi dibawah komando AFRICOM.

Peningkatan ini dapat dilihat melalui intensitas penempatan personil angkatan darat secara langsung di negara-negara Sahel pada tahun 2013. Amerika Serikat setidaknya telah menempatkan sejumlah 1.500 pasukan militer di wilayah Sahel dan Sub-Sahara pada akhir tahun 2017. Konsentrasi penempatan pasukan terbanyak oleh Amerika Serikat terpusat di Niger dengan jumlah pasukan sebanyak 800 orang. (Morgan & Bender, 2017). Strategi ini banyak menimbulkan pertanyaan terkait dengan jumlah penempatan pasukan yang sangat besar.

Cooperative Strategy Amerika Serikat dengan Niger Sebelum Tahun 2018

Kerja sama keamanan antara Amerika Serikat dan Niger sudah dimulai dari pembentukan kemitraan dengan negara-negara Sahel melalui *Pan Sahel Initiative* (PSI). PSI dibentuk pada tahun 2002 dengan beranggotakan Mali, Niger, Chad, dan Mauritania. Dalam kemitraan ini, Pemerintah Amerika Serikat telah mengeluarkan dana sebesar 7,75 juta USD dalam upaya pendanaan kemitraan tersebut dari tahun 2002 hingga 2004 (Global Security, n.d.). Kemitraan PSI selesai pada tahun 2004, yang selanjutnya diganti dengan kerjasama *The Trans Sahara Counterterrorism Partnership* (TSCTP) dan *Operation Enduring Freedom – Trans Sahara* (OEF-TS) pada tahun 2005. *The Trans Sahara Counterterrorism Partnership* (TSCTP) beranggotakan negara-negara PSI dengan tambahan

negara lainnya seperti Algeria, Burkina Faso, Kamerun, Libya, Moroko, Nigeria, Senegal dan Tunisia. Melalui TSCTP, Pemerintah Amerika Serikat memberikan bantuan baik berupa pendanaan dan bantuan teknis dalam membangun kapabilitas militer negara-negara anggota dalam menghadapi ancaman terorisme.

Pasukan angkatan darat Amerika Serikat di Niger diketahui memiliki peran untuk memfasilitasi pelatihan dalam membangun kapabilitas keamanan Niger, melakukan patroli wilayah bersama dengan pasukan Niger, hingga melakukan beberapa operasi militer langsung bersama dengan pasukan militer Niger. Besarnya jumlah penempatan pasukan yang dilakukan oleh Amerika Serikat di Niger, serta beberapa konfrontasi yang dilakukan dengan jaringan teroris memperlihatkan bahwa intensitas strategi militer yang digunakan oleh Amerika Serikat masih mengutamakan penggunaan pasukan darat dalam pelaksanaan operasi militer hingga tahun 2017.

Penyergapan di Tongo-Tongo

Penempatan pasukan yang dilakukan oleh Amerika Serikat di Niger selain ditujukan untuk mengamankan kepentingan keamanan nasional negara tersebut, juga ditujukan untuk memberikan dukungan terhadap aliansi Amerika Serikat di Afrika dalam memerangi jaringan teroris global. Selain mendukung Niger, Pemerintah Amerika Serikat juga turut mendukung Operation Barkhane yang merupakan operasi kontrateroris di wilayah Sahel

Afrika, yang diinisiasi oleh Perancis pada 1 Agustus 2014. Pemerintah Amerika Serikat memberikan bantuan langsung terhadap Perancis melalui pemberian logistik dan bantuan intelijen. Koalisi ini sudah melakukan beberapa operasi militer, salah satunya adalah konvoi patroli yang dilakukan oleh pasukan militer Amerika Serikat dan pasukan Niger melewati Tiloa, hingga berhenti di Tongo-Tongo pada 4 Oktober 2017 (Friend, 2018).

Operasi militer ini menelan korban sebanyak delapan korban tewas dan 10 korban luka-luka, diantaranya empat orang *United States Special Operation Forces* (USSOF) atau *Green Berets*, empat orang pasukan Niger, dan satu orang penerjemah setelah mendapat serangan tiba-tiba dari jaringan teroris ISIS-GS yang menggunakan strategi perang gerilya memanfaatkan kondisi geografis di desa tersebut.

Penyergapan itu menandai peristiwa kematian terbanyak di Afrika bagi militer Amerika Serikat sejak insiden *Black Hawk Down* dalam perang di Mogadishu, Somalia pada tahun 1993, ketika 18 Army Rangers Amerika Serikat kehilangan nyawa mereka (Friend, 2018). Kematian dari keempat tentara Amerika Serikat tersebut, menyoroti risiko yang muncul dari penempatan pasukan di wilayah Niger tersebut, baik operasi combat dan non-combat tetap memiliki risiko yang tinggi akan berhadapan langsung dengan jaringan teroris yang terus berkembang.

Penerapan Kebijakan Penggunaan *Unmanned Combat Aerial Vehicle* (UCAV) di Niger Pada Tahun 2018

Setelah tragedi penyerangan di Tongo-Tongo pada tanggal 4 Oktober 2017 yang menewaskan empat pasukan Amerika Serikat yang diantaranya merupakan dua orang personil *United States Special Operation Forces* (USSOF), Amerika Serikat melalui AFRIKOM mengonfirmasi untuk mengambil strategi lanjutan dalam melakukan pengamanan terhadap pasukan Amerika Serikat yang beroperasi di Niger. Upaya yang dilakukan oleh AFRIKOM meliputi peningkatan kuantitas kendaraan lapis baja, pengawasan, dan persiapan yang lebih ketat untuk memberikan support terhadap pasukan Amerika Serikat yang melakukan operasi lapangan (Petesch, 2018). Selain itu AFRIKOM juga mengonfirmasi akan mengoperasikan drone UCAV MQ-9 *Reaper* yang sudah dilengkapi dengan teknologi persenjataan pada awal tahun 2018.

Berdasarkan pada kemampuan aerial MQ-9 *Reaper* membuatnya memenuhi syarat untuk melaksanakan operasi militer yang tidak bisa dilakukan oleh pasukan militer pada umumnya, dan diusulkan oleh USAF kepada United States Departement of Defense untuk digunakan sebagai instrumen pendukung langsung bagi kontingen Amerika Serikat yang melaksanakan operasi militer di luar negeri. Dalam pengoperasiannya, UCAV MQ-9 *Reaper* cukup fleksibel untuk diterbangkan dengan kemampuan lintas wilayah. Memanfaatkan satelit, Drone MQ-9 *Reaper*

dapat diterbangkan melalui kapal induk, ataupun landasan terbang komersil dengan jangkauan pandang yang jelas dan menyediakan jalur komunikasi untuk lepas landas dan mendarat (Kowalski, 2017).

Alasan Amerika Serikat Menerapkan Kebijakan Penggunaan *Unmanned Combat Aerial Vehicle* (UCAV) di Niger Pada Tahun 2018

Potensi ancaman terorisme di wilayah Afrika khususnya wilayah Sahel menjadi alasan dari kekhawatiran Amerika Serikat. Niger dengan segala bentuk ketidakstabilan yang terjadi di dalam negara tersebut, dan negara Sahel lainnya menjadi salah satu fokus utama operasi militer Amerika Serikat di wilayah Afrika. Ancaman tersebut tentunya dapat menyebabkan distabilitas wilayah Sahel, dan secara langsung dapat mempengaruhi kepentingan keamanan nasional Amerika Serikat. Niger yang berada tepat di tengah wilayah Sahel memiliki posisi yang strategis untuk digunakan dalam menghadapi ancaman terorisme di wilayah Sahel. Berbagai pendekatan strategi telah dilaksanakan oleh Amerika Serikat baik penempatan pasukan darat hingga penggunaan drone UCAV.

Peningkatan intensitas serangan teroris semenjak tahun 2016 di wilayah Tongo-Tongo perlu menjadi pertimbangan lebih mengenai strategi seperti apa yang efektif untuk digunakan dalam operasi di wilayah tersebut. Dengan mobilisasi pasukan darat dalam jumlah besar

tentunya harus diimbangi dengan persiapan dan penguasaan geografis yang matang. Operasi dengan mobilisasi dengan jumlah besar seperti yang dilakukan di wilayah Tongo-Tongo, menghasilkan jumlah korban yang tidak dapat diantisipasi dalam operasi tersebut. Persiapan serta status Amerika Serikat yang memiliki tujuan untuk membangun kapabilitas keamanan negara-negara Sahel memberikan pasukan Amerika Serikat kontrol yang terbatas karena tidak dalam status terlibat untuk intervensi militer secara langsung, melainkan memiliki status untuk memberikan bantuan dalam koalisi *African-led, EU-Support, US-Aid* di wilayah tersebut.

Melatarbelakangi hal tersebut, Amerika Serikat merasa perlu untuk melakukan perubahan strategi yang digunakan, drone yang sebelumnya tidak memiliki teknologi persenjataan dan hanya digunakan dalam misi-misi intelijen mulai dimodifikasi untuk dipersenjatai menjadi droneUCAV di wilayah Niger dan mulai aktif beroperasi pada tahun 2018.

Melihat segala bentuk risiko penempatan pasukan serta operasi militer yang dilaksanakan di Niger, khususnya setelah penyergapan yang terjadi di Tongo-Tongo menjadi sebuah alasan rasional bagi Amerika Serikat untuk mengevaluasi kembali, pertimbangan cost dan benefit dari efektifitas strategi operasional yang digunakan di Niger. Perang antara Amerika Serikat dengan jaringan teroris global di wilayah Sahel merupakan perang asimetris, yang memerlukan pendekatan strategi militer yang berbeda dari pada perang pada

umumnya.

Melalui penyergapan di Tongo-Tongo, menggambarkan risiko dari penggunaan pasukan darat dalam menghadapi strategi perang gerilya yang digunakan oleh militan ISIS-GS. Mobilisasi pasukan dalam jumlah besar menjadi rentan ketika musuh dapat mengambil keuntungan dari lokasi geografis di Niger yang didominasi oleh dataran gersang, serta kedatangan bala bantuan dan dukungan logistik terhadap militan ISIS-GS merupakan salah satu faktor pendukung dalam keberhasilan perang gerilya yang dilakukan. Pemanfaatan keuntungan dari strategi perang gerilya tersebut mengakibatkan patroli Amerika Serikat harus kehilangan empat pasukan, beserta gear dan military equipment yang berhasil dilucuti dari pasukan Amerika Serikat oleh militan yang melakukan penyergapan di Tongo-Tongo.

Berdasarkan terhadap pertimbangan cost dan benefit dalam strategi militer di Niger, menempatkanUCAV sebagai strategi yang lebih menguntungkan karena menawarkan benefit fungsional dengan rasio untung rugi yang lebih baik yaitu 4:2, apabila dibandingkan dengan penggunaan pasukan darat dengan rasio untung rugi 2:3. Penggunaan pasukan darat dalam momentum penyergapan Tongo-Tongo menggambarkan kurangnya keuntungan strategis yang diperoleh dari strategi tersebut. Selain tewasnya empat orang pasukan Amerika Serikat, mobilisasi pasukan dalam jumlah besar menjadi sebuah kerugian dalam menghadapi strategi perang gerilya oleh musuh yang

terorganisir. Sedangkan dengan menggunakan drone UCAV, Amerika Serikat dapat meminimalisir penggunaan pasukan darat yang berisiko, teknologi yang moderen dari segi persenjataan dan sensorik, serta lebih unggul dalam melaksanakan operasi militer dengan cakupan lintas wilayah yang besar dengan waktu jelajah yang lebih singkat.

Memaanfaatkan kelebihan tersebut, drone UCAV menjadi pilihan yang lebih efektif khususnya dalam cakupan wilayah Niger dan Sahel yang memiliki banyak daerah tanpa pengawasan dari otoritas setempat. Hal ini terbukti dari penggunaan UCAV yang diterbangkan melalui Niger dalam misi *target killing* di Libya dan komitmen peningkatan intensitas penggunaan drone UCAV dalam berbagai misi baik oleh pasukan Amerika Serikat maupun untuk pemberian dukungan terhadap sekutu.

5. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa untuk mencapai kepentingan nasional sebuah negara khususnya dibidang keamanan, negara dihadapkan pada pada sebuah bentuk strategi kerja sama atau cooperative strategy. Beragam strategi dan upaya dalam mencapai kepentingan keamanan dapat dilakukan oleh suatu negara disesuaikan dengan ancaman yang sedang dihadapi, baik berupa operasi militer atau pembangunan kapabilitas keamanan negara yang diajak untuk bekerja sama. Dalam perang asimetris dengan jaringan teroris, pendekatan strategi militer yang digunakan juga

berbeda daripada pendekatan strategi militer pada umumnya. Amerika Serikat sebagai sebuah negara yang menempatkan terorisme sebagai prioritas ancaman terorismenya, telah melakukan berbagai upaya untuk memberantas jaringan terorisme global. Melalui kebijakan Global War on Terror (GWOT), Amerika Serikat merasa perlu untuk melindungi keamanan nasional negaranya dan perlu untuk memperoleh dukungan dari negara lain untuk menjadikan isu terorisme ini sebagai ancaman global.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Buzan, B. (1983). *People State and Fear: The National Security Problem in International Relations*. Department of International Studies University of Warwick.
- Buzan, B. (1991). *People State and Fear: An Agenda for International Security Studies in Post Cold Era War*.
- Mas'oeed, M. (1989). *Studi Hubungan Internasional, Tingkat Analisis dan Teorisasi*. Studi Sosial Universitas Gajah Mada.
- Mas'oeed, M. (1990). *Ilmu Hubungan Internasional : Disiplin dan Metodologi*. Jakarta: LP3ES.
- Posen, B. R. (2014). *Restraint: A New Foundation For U.S. Grand Strategy*. Cornell University Press.
- Zenko, M. (2013). *Reforming U.S. Drone Strike Policies*. Council on Foreign Relations.

Jurnal/Dokumen/Karya Ilmiah

- Callam, A. (2010). *Drone Wars: Armed Unmanned Aerial Vehicles*. Dipetik

- pada 24 September 2019, dari
<https://capapu.ga/n-h.pdf>
- Dueck, C. (2004). Ideas and Alternatives in American Grand Strategy, 2000-2004. Dipetik pada 18 Juli 2019, dari
<http://www.jstor.org/stable/20097935?origin=JSTOR-pdf>
- Gertler, J. (2012). U.S. Unmanned Aerial Systems. Dipetik pada 8 November 2019, dari
<https://fas.org/sgp/crs/natsec/R42136.pdf>
- Kowalski, J. (2017). The Wright Flyer Papers. The Future of Remotely Piloted Aircraft in Special Operations. Dipetik pada 28 Februari 2020, dari
https://media.defense.gov/2018/Jan/02/2001862351/-1/-1/0/WF_0060_KOWALSKI_FUTURE_REMOTELY_PILOTED.PDF
- Lyman, P. (n.d.). The War on Terrorism in Africa. Dipetik pada 7 Maret 2020, dari
https://www.cfr.org/content/thinktank/Lyman_chapter_Terrorism.pdf
- Stohl, R. (2018). AN ACTION PLAN ON U.S. DRONE POLICY: Recommendations for the Trump Administration. Dipetik pada 19 November 2019, dari
<https://www.stimson.org/sites/default/files/file-attachments/Stimson%20Action%20Plan%20on%20US%20Drone%20Policy.pdf>
- Wijaya, D. M. (2019). Penempatan Pasukan Militer Amerika Serikat di Niger Sebagai Bagian Dari Kebijakan Global War on Terror Tahun 2013-2017. Diakses pada September 2019. Dipetik pada 18 Maret 2019
- Woodhams, G. (2018). UNIDIR. Weapons of Choice? The Expanding Development, Transfer and Use of Armed UAVs. Dipetik pada 3 Desember 2019, dari
<https://www.unidir.org/files/publications/pdfs/weapons-of-choice-the-expanding-development-transfer-and-use-of-armed-uavs-en-723.pdf>
- Website**
- Balima, B. (2017). Reuters. At least 46 attacks in area of Niger where U.S. troops killed: U.N. Dipetik pada 5 Februari 2020, dari
<https://www.reuters.com/article/us-niger-usa/at-least-46-attacks-in-area-of-niger-where-u-s-troops-killed-u-n-idUSKBN1CP20E>
- Borger, J., & Maclean, R. (2018). The Guardian. Pentagon investigation into lethal Niger ambush finds multiple failures. Dipetik pada 26 Februari 2019, dari
<https://www.theguardian.com/us-news/2018/may/10/niger-ambush-pentagon-report-failures>
- CNN. (2017). New details on deadly ambush in Niger that left 4 soldiers dead. Dipetik pada 18 Oktober 2019, dari
<https://edition.cnn.com/2017/10/10/politics/niger-deadly-ambush-us-intelligence/index.html>
- Dewi, L. G. (2019). Kepentingan Amerika Serikat Menarik Diri Dari Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) Tahun 2018. Dipetik pada 17 September 2019
- Essoungou, A.-M. (2013). The Sahel: One region, many crises. Dipetik pada 7 Desember 2019, dari
<https://www.un.org/africarenewal/magazine/december-2013/sahel-one-region-many-crises>
- FATF-GIABA-GABAC. (2016). TERRORIST FINANCING IN WEST AND CENTRAL AFRICA. Dipetik pada 5 Januari 2020, dari
<https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Terrorist-Financing-West-Central-Africa.pdf>
- Friend, A. H. (2018). DoD's Report on the Investigation into the 2017 Ambush in Niger. Dipetik pada 4 Januari 2020, dari
<https://www.csis.org/analysis/dods-report-investigation-2017-ambush-niger>

- Gibbons-Neff, T. (2018). An Operation in Niger Went Fatally Awry. Who Is the Army Punishing? Dipetik pada 23 Januari 2020, dari <https://www.nytimes.com/2018/11/03/world/middleeast/army-niger-members-punished.html>
- Global Security. . (n.d.). Dipetik pada 12 September 2019, dari Operation Enduring Freedom - Trans Sahara (OEF-TS): <https://www.globalsecurity.org/military/ops/oef-ts.htm>
- Global Security. . (n.d.). Dipetik pada 12 September 2019, dari Pan Sahel Initiative (PSI): <https://www.globalsecurity.org/military/ops/pan-sahel.htm>
- GTI. (2014). Institute for Economics and Peace. Dipetik pada 24 Januari 2020, dari Global Terrorism Index: <content/uploads/2015/06/Global-Terrorism-Index-Report-2014.pdf>
- GTI. (2016). Institute for Economics and Peace. Dipetik pada 24 Januari 2020, dari Global Terrorism Index: <http://economicsandpeace.org/wp-content/uploads/2016/11/Global-Terrorism-Index-2016.2.pdf>
- Karimi, F. (2018). US has hundreds of troops in Niger. Here's why. Dipetik pada 2 Februari 2020, dari <https://edition.cnn.com/2018/05/10/politics/niger-american-troops-presence/index.html>
- Miller, B. (2010). Explaining Changes in U.S. Grand Strategy: 9/11, the Rise of Offensive Liberalism, and the War in Iraq. Dipetik pada 10 Agustus 2019, dari <https://poseidon01.ssrn.com/delivery.php?ID=8930021270970241140711150711130050861170780190600660551100210871030240930690221050680131210040030171160600261060030670700981131160820710480610300311100930821181110030500620901150930070800191210021031261000670931>
- Murphy, M. (2018). U.S. troops involved in at least 10 undisclosed firefights in West Africa: report. Dipetik pada 7 Januari 2020, dari <https://www.marketwatch.com/story/us-troops-involved-in-at-least-10-undisclosed-firefights-in-west-africa-report-2018-03-14>
- Niger, A. (2017). Dernier hommage aux soldats tués dans l'embuscade à Tongo Tongo. Dipetik February 26, 2020, dari <http://news.aniamey.com/h/82012.html>
- Penney, J. (2019). C.I.A. Drone Mission, Curtailed by Obama, Is Expanded in Africa Under Trump. Dipetik pada 22 Juli 2019, dari <https://www.nytimes.com/2018/09/09/world/africa/cia-drones-africa-military.html>
- Petesch, C. (2018). After deadly Niger ambush, US military in Africa says changes made to protect troops. Dipetik pada 22 Agustus 2019, dari <https://www.militarytimes.com/flash-points/2018/07/30/after-deadly-niger-ambush-us-military-in-africa-says-changes-made-to-protect-troops/>
- Petesch, C. (2018). US confirms drones in Niger have striking capabilities. Dipetik pada 24 Agustus 2019, dari <https://www.militarytimes.com/flash-points/2018/07/29/us-confirms-drones-in-niger-have-striking-capabilities/>
- Plumer, B. (2013). Nine facts about terrorism in the United States since 9/11. Dipetik pada 12 Juli 2019, dari <https://www.washingtonpost.com/news/wonk/wp/2013/09/11/nine-facts-about-terrorism-in-the-united-states-since-911/?noredirect=on>
- Radia, K., & McLaughlin, E. (2017). ABC News. New details from Niger ambush: when US troops sensed something wrong. Dipetik pada 7 Februari 2020, dari <https://abcnews.go.com/International/details-niger-ambush-us-troops-sensed-wrong/story?id=50622894>
- Raghavan, S. (2012). Niger Struggles Against Militant Islam. Dipetik pada 2 Desember 2019, dari <https://www.washingtonpost.com/w>

orld/niger-struggles-against-militant-islam/2012/08/16/9b712956-d7f4-11e1-98c0-31f6f55bdc4a_story.html

Rukmini, C. (2018). 'An Endless War': Why 4 U.S. Soldiers Died in a Remote African Desert. Dipetik pada 8 September 2019, dari <https://www.nytimes.com/interactive/2018/02/17/world/africa/niger-ambush-american-soldiers.html>

Sepulvede, E., & Smith, H. (2017). Technology challenges of stealth Unmanned Combat Aerial Vehicles. Dipetik pada 20 Oktober 2019, dari https://dspace.lib.cranfield.ac.uk/bitstream/handle/1826/12639/Technology_challenges_of_stealth_unmanned_combat_aerial_vehicles.pdf?sequence=3&isAllowed=y

UNDP. (2019). Human Development Report 2019. Beyond income, beyond averages, beyond today: Inequalities in human development in the 21st century. Dipetik pada 15 Januari 2020, dari <http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2019.pdf>

United State Air Force. (2010). Dipetik 27 Februari, 2020, dari MQ-9 Reaper: <https://web.archive.org/web/20130826113318/http://www.af.mil/AboutUs/FactSheets/Display/tabid/224/Article/104470/mq-9-reaper.aspx>

Walsh, D., & Schmitt, E. (2018). U.S. Strikes Qaeda Target in Southern Libya, Expanding Shadow War There. Dipetik pada 18 Januari 2020, dari <https://www.nytimes.com/2018/03/25/world/middleeast/us-bombs-qaeda-libya.html>

Zyck, S. A., & Muggah, R. (2013). Conflicts Colliding in Mali and the Sahel. Dipetik pada 24 Oktober 2019, dari <https://www.stabilityjournal.org/articles/10.5334/sta>